

**PENERAPAN KLAUSULA *FORCE MAJEURE* TERHADAP DEBITUR DI  
LEMBAGA PERKREDITAN DESA METRA BANGLI YANG  
MENGALAMI KREDIT MACET PADA MASA COVID-19**

Oleh

I Gusti Ngurah Ari Karuniawan. NIM 1914101087

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Metra. Penarikan jaminan ini dilaksanakan karena tidak diterapkannya klausula *Force Majeure* oleh Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19 seharusnya dalam menangani kredit macet LPD menerapkan klausula *Force Majeure* dengan tidak melakukan penarikan jaminan justru memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*non doctrinal*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti SK Pendirian LPD Metra Bangli, *awig-awig*, laporan Riwayat kredit, profil lembaga, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli tetapi didasari atas kesepakatan dari pihak kreditur dengan debitur untuk dilakukan penarikan terhadap jaminanya.

**Kata Kunci:** Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, *Force Majeure*.

**IMPLEMENTATION OF THE FORCE MAJEURE CLAUSE TO DEBTORS  
IN LEMBAGA PERKREDITAN DESA METRA BANGLI WHO  
EXPERIENCED NON-PERFORMING LOAN DURING COVID-19**

by

I Gusti Ngurah Ari Karuniawan. NIM 1914101087

*Law Departemen*

**Abstract**

*This research was motivated by the collateral during the Covid-19 pandemic at the Lembaga Perkreditan Desa Metra. The withdrawal of this guarantee was carried out because the Force Majeure clause was not implemented by the Lembaga Perkreditan Desa Metra in handling bad loans during the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 period, when dealing with Non-Performing Loan, the LPD should have applied a Force Majeure clause by not withdrawing collateral, instead providing relief to debtors affected by Covid-19. The purpose of this study is to examine and analyze the application of the Force Majeure clause regulated in Article 1245 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata for Lembaga Perkreditan Desa Metra in dealing with bad loans during the Covid-19 period. This research uses non-doctrinal empirical legal research. The data sources used in this withdrawal study are primary and secondary. Primary data were obtained through interviews and observations with the head of the Lembaga Perkreditan Desa Metra (LPD). Secondary data is obtained by reading, studying, and understanding literature, books, and documents such as the LPD Metra Bangli Establishment Decree, awig-awig, credit history reports, institution profiles, related books, the internet, and so on. The results of the study show that the withdrawal of the collateral used by the debtor to make a loan at LPD Metra Bangli is based on an agreement between the creditor and the debtor to withdraw the collateral.*

**Keyword:** Lembaga Perkreditan Desa, Non-Performing Loan, Force Majeure.